

Menteri ATR/BPN Tuntaskan Sengketa Lahan Milik TNI dengan Pihak Lain

JAKARTA (IM) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan, akan menyelesaikan masalah sengketa lahan milik TNI dengan pihak lain. Bahkan AHY mengaku telah berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal lahan-lahan yang masih menjadi sengketa itu.

AHY mengatakan hal ini saat menghadiri fun run Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/3).

"Saya sudah bicara dengan Panglima TNI dengan sejumlah pejabat teras di TNI, kami memikirkan bagaimana lahan-lahan yang seharusnya memang didedikasikan dan menjadi milik TNI, darat, laut, dan udara, termasuk juga Polri," kata AHY kepada beberapa wartawan.

"Kami akan berjuang, kita kawal jangan sampai nanti masih terjadi sengketa di lapangan," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

AHY menyebutkan, salah satu fokus Kementerian ATR/BPN adalah menanganai permasalahan sengketa lahan milik TNI dengan pihak lain.

"Sebagai contoh saya baru saja ke Kalimantan Timur, meninjau Ibu Kota Nusantara, tetapi menyempatkan dulu untuk menyerahkan sertifikat kepada Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II yang berlokasi di Kaltim," kata AHY.

"Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat baik karena setelah sekian tahun diurus akhirnya bisa dan itu juga yang akan bisa memudahkan melanjutkan pembangunan secara fisik infrastruktur di sana," katanya. ● han

Panglima TNI Terima Brevet Kehormatan Hiu Kencana Kapal Selam TNI AL

JAKARTA (IM) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana. Dengan demikian, Agus resmi sebagai warga kehormatan Korps Hiu Kencana oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali.

Upacara pemberian Brevet Kehormatan Hiu Kencana digelar, di Dermaga Madura, Koarmada II Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/3).

Penyematan brevet diawali dengan meninjau fasilitas di KRI I Gusti Ngurah Rai-332 (KRI GNR-332) dan menerima penjelasan singkat Pusat Informasi Tempur (PIT) KRI Kelas REM. Kemudian Panglima TNI dan pejabat yang akan disemat menerima safety brief dan medical checkup di Conference Room KRI GNR-332.

Panglima TNI dan rombongan berpindah ke KRI Alugoro-405 untuk dilanjutkan dengan penyematan Brevet Hiu Kencana di dalam KRI

Alugoro-405 yang berlayar di sekitar Selat Madura.

Dalam rangkaian penyematan, Panglima TNI beserta rombongan menyaksikan demonstrasi pembebasan sandera dan Visit Board Search and Seizure (VBSS) dengan menggunakan teknik fast rope dan KRI Soputan-923 sebagai kapal sasaran oleh prajurit Kopaska.

Selain Panglima TNI, brevet kehormatan

juga disematkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Danjen Akademi TNI Laksdya TNI Dadi Hartanto, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Agus Hariadi, Dankodiklat Letjen TNI (Mar) Nur Alamsyah, Panglima Komando Armada II Laksdya TNI Denih Hendrata, Panglima Komando Armada III Laksdya TNI Hersan. Turut onboard di KRI Alugoro-405 Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



AKSI FJL BERSIH SAMPAH INTERNASIONAL
Anggota Divisi Marine Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) Aceh memungut sampah internasional di pantai Balu, Desa Gugop, Pulo Aceh, Aceh Besar, Minggu (3/3). FJL Aceh menyebutkan sampah internasional yang terdiri dari botol kaca dan botol plastik yang diperkirakan dari negara Malaysia, Maldives, Tiongkok, Thailand dan beberapa negara lainnya itu terdampar di pulau terlantar Kab. Aceh Besar.

Era Presiden Jokowi Tak Ada Hak Angket, Jimly: 10 Tahun Kok DPR-nya Memble

Rata-rata presiden sebelum Jokowi pernah mengalami hak angket DPR. Mulai dari BJ Habibie, Gusdur, Megawati Soekarnoputri, hingga SBY.

JAKARTA (IM) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebut hanya di era kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), DPR tak pernah menggunakan hak angket. Padahal, hak angket

merupakan salah satu wujud dari check and balances yang bisa dilakukan DPR kepada pemerintah.

"Ini penting untuk check and balance. Kan saya bilang ini sejak reformasi cuma dia (Jokowi) saja, semua presiden

tuh kebagian kena angket," kata Jimly dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com, Sabtu (2/3).

Hak angket merupakan bentuk bahwa DPR RI betul-betul bekerja menjalankan tugas dan fungsinya. Kehadiran hak angket juga tidak akan memecah belah bangsa Indonesia serta menjadi indikator bahwa demokrasi di Tanah Air berjalan baik.

"(Tanpa hak angket) Tidak berfungsi dengan baik. Itu

juga tidak sehat untuk catatan demokrasi 10 hingga 20 tahun ke depan. Ada periode (kepemimpinan Jokowi) 10 tahun kok parlemennya memble," ucapnya.

Rata-rata pemerintahan presiden sebelum Jokowi mengalami hak angket DPR. Mulai dari Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

"Nah satu-satunya yang belum ngalamin nih Jokowi. Itu artinya fungsi parlemen tidak jalan," ucapnya.

Memang belakangan ramai wacana penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Hal ini pertama kali diungkap oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket karena menurutnya DPR tidak boleh diam dengan dugaan kecurangan yang menurutnya sudah telanjang.

Wacana ini disambut calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan partai politik pengusungnya juga siap untuk menggulirkan hak angket. Ketiga parpol pengusung Anies-Muhaimin adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ujarnya saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2) lalu. ● han

Achsanul Qosasi Diadili 7 Maret Terkait Uang Panas Korupsi BTS 4G Rp40 Miliar

JAKARTA (IM) - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal menggelar sidang perdana kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan terdakwa Achsanul Qosasi dan Sadikin Rusli pada Kamis (7/3).

Achsanul Qosasi merupakan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara, Sadikin Rusli merupakan pihak swasta. Keduanya diduga menerima uang panas Rp 40 miliar untuk mengondisikan hasil audit BPK terkait proyek pembangunan BTS 4G 5 yang dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

"Kamis, 7 Maret 2024, pukul 10.00 WIB sidang pertama di ruang sidang Prof Muhammad Hatta Ali," demikian agenda sidang yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, dikutip pada Minggu (3/3).

Achsanul Qosasi dan Sadikin Rusli diduga melakukan permafakatan jahat untuk mengondisikan hasil audit BPK pada proyek BTS 4G.

Sedangkan Sadikin diduga menjadi perantara Achsanul untuk menerima uang Rp 40 miliar dari terdakwa kasus BTS 4G lainnya, Irwan Hermawan dan Windi Purnama.

Pemberian uang kepada BPK melalui Sadikin ini disebut dilakukan oleh Irwan Hermawan atas perintah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif.

"Berdasarkan hasil penyidikan dapat kami pastikan bahwa penerimaan uang oleh Saudara AQ (Achsanul Qosasi) tersebut merupakan upaya untuk mengondisikan hasil audit BPK," kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jakarta, Kamis 16 November 2023 lalu.

"Uang tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang telah mereka terima dari Saudara IH (Irwan Hermawan) melalui WP (Windi Purnama)," katanya.

Kejagung juga telah menerima pengembalian

uang dari Achsanul dan Sadikin sebesar Rp 31,4 miliar dalam bentuk dollar Amerika Serikat (AS).

"Tim penyidik Kejagung Tindak Pidana Khusus telah berhasil mengupayakan pengembalian dan penyerahan sejumlah uang yaitu sebesar 2.021.000 dollar AS dari Saudara AQ dan Saudara SDK (Sadikin Rusli) yang kami terima melalui pengacara yang bersangkutan," ungkapnya.

Sadikin Rusli ditetapkan tersangka pada Minggu 15 Oktober 2023 lalu. Sementara itu, Achsanul ditetapkan tersangka oleh Kejagung pada Jumat (3/11).

Keduanya dijerat Pasal 15 atau Pasal 12B atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Nama Achsanul muncul di pengadilan Nama Achsanul terungkap ketika jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung memeriksa eks Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak, sebagai terdakwa kasus ini. ● han

Khofifah: Insyallah Prabowo-Gibran akan Dilantik pada Oktober 2024

JAKARTA (IM) - Dewan Pengarah dan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa, meyakini pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden terpilih.

Keyakinan itu disampaikan Khofifah pada acara silaturahmi kebangsaan bersama muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan unsur-unsur relawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Sabtu (2/3).

"Insyallah yang dilantik bulan Oktober nanti adalah presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto yang nanti akan menjalankan tugas sebaik-baiknya bersama wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka," kata Khofifah, dikutip dari siaran pers, Minggu (3/3).

Ia meyakini bahwa Jawa Timur menjadi pusat kemenangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan nusantara lahir dari bumi Majapahit dan itu berada di Jawa Timur, karena seperti yang selalu digaungkan Prabowo tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme itu jantungnya ada di Jawa Timur," ujar Gubernur Jawa Timur itu.

Berdasarkan real count sementara, Prabowo-Gibran meraih suara 58,83 persen. Data dihimpun per hari ini pukul 13.00 WIB. Data itu dihitung berdasarkan 642.518 dari total 823.236 tempat pemungutan suara (IPS) di seluruh Indonesia. Dalam acara tersebut,

Prabowo meminta pendukungnya tidak membuat euforia karena ia unggul berdasarkan real count pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Ini jangan membuat kita euforia, jangan membuat kita gembira berlebihan, tapi membuat kita berterima kasih, merenung sejenak," kata Prabowo.

Perolehan suara itu, kata Prabowo, justru menandakan tanggung jawab yang besar.

"Karena dengan diberi mandat sesungguhnya berarti tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia sekarang terletak di pundak kami," ujar Prabowo.

Menteri Pertahanan RI itu juga menyatakan tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memilihnya.

"Saya berpikir ini suatu tantangan, tapi tantangan yang mulia," kata Prabowo. ● han

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT NIUM MITRA INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") yang ditandatangani pada tanggal 29 Februari 2024, telah disetujui oleh para pemegang saham: Peningkatan Modal Ditempatkan/ Disetor Perseroan dengan cara konversi pinjaman menjadi saham. Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta, 04 Maret 2024
Direksi Perseroan



KOMPETISI MELUKIS TOKOH SEJARAH SOLO
Peserta menyelesaikan lukisannya saat mengikuti Lomba Seni Lukis Tokoh Sejarah Kota Solo di Graha Wisata Niaga Solo, Jateng, Minggu (3/3). Kompetisi melukis yang diikuti 100 seniman itu digelar sebagai upaya mengenang jasa para tokoh sejarah nasional dari Kota Solo.

KPK Dalam Persoalan Penerbitan WIUP Tambang di Maluku Utara

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami persoalan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Maluku Utara (Malut).

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya telah mendalami materi tersebut dari dua orang saksi, yakni PNS Badan Kepegawaian Daerah, Muhammad Ad Miftah Baay dan seorang lagi dari pihak swasta bernama Arsyad Sanakhi.

Keduanya diperiksa penyidik sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba pada Jumat (29/2).

"Materinya didalam terkait perizinan WIUP di Maluku Utara," ujar Ali.

Abdul Ghani dituduh dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK 18 Desember tahun lalu di Jakarta.

Ia dan anak buahnya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur jalan. Belakangan, KPK melebarkan penyidikan dan mengusut dugaan korupsi di sektor izin tambang.

Tidak hanya itu, KPK juga tengah membidik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penyidik telah memanggil dua anak Abdul Ghani yakni M. Thoriq Kasuba dan Nurul Izzah untuk diperiksa sebagai saksi. ● mei



ANGKA KUNJUNGAN WISATAWAN KE LOMBOK UTARA

Wisatawan asing melintas di pinggir Pantai Nipah, Kecamatan Pemenang, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Minggu (3/3). Data Dinas Pariwisata Kab. Lombok Utara mencatat selama 2023 wisatawan yang berkunjung ke Lombok Utara sebanyak 656.448 orang, terdiri dari wisatawan nusantara 74.470 orang dan wisatawan mancanegara 581.978 orang.